



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 3 Maret 2023/Periodik - 2022)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH KOTA SURABAYA
UNIT KERJA : DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **DEDIK IRIANTO**
2. Jabatan : **KEPALA DINAS**
3. NHK : **192224**

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN	Rp.	2.830.000.000
1. Tanah dan Bangunan Seluas 182 m2/190 m2 di KAB / KOTA KOTA SURABAYA , HASIL SENDIRI		Rp. 2.200.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 102 m2/64 m2 di KAB / KOTA SIDOARJO, HASIL SENDIRI		Rp. 630.000.000
B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN	Rp.	314.900.000
1. MOBIL, TOYOTA TOYOTA VELOZ 1.5 Q CVT Tahun 2022, HASIL SENDIRI		Rp. 310.000.000
2. MOTOR, HONDA E1FOZN11M2 AT Tahun 2015, HASIL SENDIRI		Rp. 4.900.000
C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	364.000.000
D. SURAT BERHARGA	Rp.	----
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	512.558.622
F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	4.021.458.622
III. HUTANG	Rp.	235.000.000
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	3.786.458.622

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-



Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.